

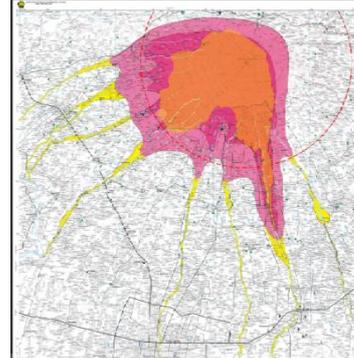
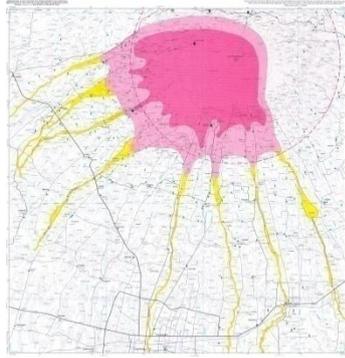
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 setidaknya telah menghasilkan kerugian sekitar Rp 4,51 triliun dan Rp 894,35 miliar pada kerusakan. Laporan kerusakan tersebut meliputi bidang pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, pertanian, pariwisata, serta dari sektor lainnya (Aisyah, 2017, hal. 13). Dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi membuat bergesernya Kawasan Rawan Bencana (KRB) lebih meluas dari pada tahun sebelumnya. Berdasarkan PETA KRB Gunung Merapi Tahun 2002 beberapa dusun seperti Kopeng, Kepuharjo, Pangukrejo, Cangkringan dan dusun lainnya yang terletak di sebelah barat daya dari Gunung Merapi semula berada di kawasan KRB II namun setelah erupsi 2010 menjadi KRB III.

Kawasan Rawan Bencana (KRB) III ialah kawasan yang terletak didekat sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu dan lontaran batu pijar (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2011, para. 3). KRB III sebagai zona bahaya yang paling tinggi tingkatannya sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mendirikan pemukiman disana. Sebagaimana yang diterangkan dalam BAPPEDA Sleman, KRB III hanya diperuntukkan sebagai pemanfaatan sumber daya kehutanan, penanggulangan bencana, pertanian, konservasi dan perikanan (BAPPEDA Sleman, Melihat Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi. para. 8) Artinya selain untuk kegiatan penelitian dan sebagai kawasan hutan lindung, KRB III haruslah *zero activities* guna mencegah hal yang tidak diinginkan.

Adapun daerah yang terkena erupsi Gunung Merapi antara lain Kabupaten Boyolali, Klaten, Magelang dan Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Sleman sendiri wilayah yang terkena dampak yang paling parah dari erupsi Gunung Merapi adalah Kecamatan Cangkringan yang meliputi Desa Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen (Glagaharjo), Kepuharjo, Argomulyo, dan Wukirsari.



Gambar 1.1 Peta KRB Gunung Merapi dan Area Terdampak Letusan 2002 **Gambar 1.2** Peta KRB Gunung Merapi dan Area Terdampak Letusan 2010

Sumber: Dok. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral – Badan Geologi

Warga yang terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi tentunya tidak ingin selamanya merasakan kesusahan berlarut-larut. Perlu adanya kesadaran untuk memulihkan lingkungan mereka lagi dengan cara mengurangi risiko bencana. Tanggungjawab dari penurunan risiko bencana bukanlah menjadi kewajiban pemerintah pusat saja, akan tetapi seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu untuk memikirkan mekanisme pengurangan risiko bencana. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana adalah resiliensi komunitas. Resiliensi komunitas menurut VanBreda (2001, hal. 1) adalah kemampuan komunitas untuk membangun, mempertahankan, dan mendapatkan kembali tingkat kapasitas komunitas dalam menghadapi kesulitan dan tantangan positif. Resiliensi komunitas bisa dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Modal Sosial menurut Putnam (1993, hal. 169) sebagai sebuah fitur organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi tindakan dan kerja sama agar dapat bermanfaat satu sama lain. Modal sosial ini nantinya diharapkan bisa menjadi alat untuk masyarakat mengatasi dampak dan mampu mengurangi risiko bencana yang ada di lingkungannya.

Desa Kepuharjo merupakan salah satu wilayah yang juga terkena dampak paling parah dari erupsi Gunung Merapi 2010. Oleh karena itu, setelah 2010 wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah KRB III. Mengutip Pemerintah Desa Kepuharjo (Letak dan Luas Wilayah, [para. 1](#)) karena letaknya yang masuk KRB III Desa Kepuharjo harus berkoordinasi dengan beberapa relawan diantaranya SKSB, Palem, Jajaran Cakra, Komunitas Balerante yang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan peringatan dini kepada para penambang yang mungkin sedang bekerja.

Terdapat tiga dusun yang masuk ke KRB III yaitu Kaliadem, Petung, dan Jambu. Total penduduk yang berada pada KRB III tersebut ialah 3.668 kepala keluarga. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tiga desa lainnya seperti Umbulharjo dan Glagaharjo. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun hunian tetap di Desa Kepuharjo diantaranya Huntap Batur dan Huntap Pagerjurang. Namun agaknya masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi masih belum *aware* tentang dampak yang mungkin terjadi dan memilih untuk kembali ke rumah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan seperti wisata *lava tour* dan mini museum yang dibangun oleh warga di Dusun Kopeng dan Jambu, Kepuharjo, Cangkringan.

Alasan peneliti memilih Desa Kepuharjo sebagai objek penelitian karena desa tersebut merupakan desa yang termasuk wilayah KRB III yang mampu resilien dalam waktu singkat pasca bencana erupsi merapi 2010. Selain itu, sebagai wilayah yang termasuk KRB III sudah seharusnya tidak diperbolehkan adanya aktivitas dalam bentuk apapun. Namun masyarakat Desa Kepuharjo, sebagian memilih untuk membangun kembali rumahnya dan beraktivitas seperti biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk modal sosial yang ada pada masyarakat Desa Kepuharjo serta mendeskripsikan peran modal sosial yang dimiliki dengan upaya pengurangan risiko bencana dan resiliensi komunitas.

B. Rumusan Masalah

Kerentanan yang menimbulkan sebuah bahaya bisa menyebabkan bencana. Menurut David dan Alexander (dalam Özerdem dkk:2006) wilayah rawan bencana memiliki enam jenis kerentanan antara lain: kerentanan ekonomi, kerentanan dalam bidang teknologi, kemunduran atau ketertinggalan yang terjadi pada masyarakat, perpindahan penduduk, dan kerentanan dari penolakan norma, aturan dan regulasi yang dianggap aman. Masyarakat Desa Kepuharjo ialah salah satu komunitas yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi karena terancam oleh erupsi Gunung Merapi. Namun masyarakat di Desa Kepuharjo enggan untuk dievakuasi dan memilih tetap tinggal di rumah. Pilihan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti hubungan erat dan kepercayaan antar anggota masyarakat atau biasa kita sebut sebagai modal sosial. Maka rumusan masalah pertama adalah **apa saja modal sosial yang ada dan jelaskan bagaimana proses modal sosial tersebut terbentuk?**

Modal sosial sangat dibutuhkan karena dengan adanya modal sosial masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan individu yang tinggal bersama saja, melainkan individu yang saling bermanfaat, saling percaya dan memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Ketika setiap individu memiliki perasaan tanggung jawab yang sama, maka tentunya mereka akan saling menjaga satu sama lain. Sebagai Desa yang berada di KRB III, sudah seharusnya anggota masyarakat Kepuharjo memiliki modal sosial. Menurut Ledogar dan Fleming (2008, hal. 3) modal sosial memiliki lima komponen yang salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu kuatnya modal sosial yang dimiliki akan berpengaruh positif maupun negatif bagi masyarakat terutama terkait upaya pengurangan risiko bencana. Bisa jadi kuatnya modal sosial itu bisa menggerakkan kesadaran masyarakat untuk selalu siaga terhadap ancaman bencana, namun bisa juga membuat masyarakat lengah dari ancaman bencana. Maka rumusan masalah kedua adalah **bagaimana modal sosial yang telah terbentuk tersebut mempengaruhi proses mitigasi bencana?**

Sebagai salah satu daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi cukup parah, tentunya banyak sekali kerugian yang diterima oleh masyarakat Desa Kepuharjo. Kerugian tersebut tentunya tidak sendirinya akan membaik bila tanpa adanya tindakan dari anggota masyarakat. Partisipasi aktif dan tindakan kolektif sangat dibutuhkan apabila sebuah masyarakat ingin bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh bencana. Untuk menciptakan tindakan kolektif itu dibutuhkan modal sosial berupa jaringan komunitas, kepercayaan, dan resiprositas masyarakat, (Woolcock, 2001, hal. 6). Pasca erupsi Merapi, masyarakat Kepuharjo mampu beradaptasi dari keterpurukan dengan mengubah kerugian menjadi sebuah keuntungan. Hal tersebut dinamakan sebagai resiliensi. Ketahanan masyarakat Desa Kepuharjo terhadap bencana bisa saja berkaitan dengan modal sosial yang mereka miliki dalam upaya mempengaruhi resiliensi. Maka rumusan masalah ketiga adalah **Peran seperti apakah yang diberikan oleh modal sosial untuk membuat komunitas itu menjadi resilien?**

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui peran seperti apa yang diberikan dari modal sosial yang dimiliki oleh anggota komunitas Desa Kepuharjo terhadap mitigasi bencana dan resiliensi komunitas.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didukung oleh beberapa riset terdahulu yang relevan tentang kebencanaan. Mengadaptasi topik penelitian bencana milik Oliver Smith (1996, hal. 305), peneliti membagi topik penelitian riset terdahulu menjadi empat yaitu pertama tentang respon perilaku dari individu/kelompok/institusi, kedua perubahan sosial paska terjadinya bencana, ketiga resiliensi dalam bencana, dan keempat modal sosial dalam bencana. Topik penelitian pertama yaitu respon perilaku baik itu individu, kelompok maupun institusi. Topik penelitian ini secara umum membicarakan tentang perilaku individu dan kelompok dalam menghadapi dampak bencana. Respon perilaku baik individu maupun kelompok dibagi menjadi dua yaitu pra bencana dan paska bencana. Perilaku Individu maupun kelompok pada pra bencana misalnya seperti penelitian milik Tiyas Trirahayu (Manajemen Bencana Erupsi Gunung Merapi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2015), penelitian milik Nur Isnainiati dkk. (Kajian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, 2014), Amin Nur Setiono (Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, 2014), penelitian Titan Roskusumah (Komunikasi Mitigasi Bencana oleh Badan Geologi KESDM di Gunung Merapi Merapi Prov. D.I. Yogyakarta, 2013). Sedangkan untuk perilaku individu/kelompok dalam merespon paska bencana misalnya seperti penelitian milik Putri Cep Alam dkk. (Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, 2013) dan penelitian milik Sri Aminatun, dkk. (Implementasi Kebijakan Relokasi Permukiman Terhadap Ancaman Tanah Longsor, 2015).

Topik penelitian kedua adalah perubahan sosial paska terjadinya bencana. Bencana yang terjadi pada satu wilayah selain mengakibatkan korban jiwa, ia juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial politik dan ekonomi. Banyak masyarakat lereng merapi yang kehilangan ternak mereka karena terkena awan panas pada erupsi 2010 kemarin. Akibatnya banyak masyarakat yang menganggur karena sudah tidak memiliki hewan ternak lagi. Meskipun pemerintah memang menjanjikan akan menggantikan hewan ternak kepada masyarakat namun tentu ganti rugi tersebut tidak lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan ide lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lereng paska erupsi merapi dengan cara budidaya ulat sutera, hal ini dibahas oleh R. Sudaryanto

dkk dalam penelitiannya (Kajiwan Awal untuk Mempercepat Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terkena Bencana Erupsi Gunung Merapi Melalui Budidaya Ulat Sutera, 2011).

Topik ketiga adalah resiliensi dalam bencana. Biasanya topik penelitian ini fokus membahas bagaimana ketangguhan masyarakat di sebuah desa atau wilayah dalam menghadapi bencana. Seperti penelitian milik Sriadi Setyawati dkk. (Kecerdasan Tradisional dalam Mitigasi Bencana Erupsi pada Masyarakat Lereng Baratdaya Gunung Merapi, 2015). seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Happy Ade Permanasari dan Sunarto (Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi: Studi Kasus di Desa Umbuharjo, Sleman, 2011), penelitian milik Agus Susilo (Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gunung Merapi di Desa Dompok, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, 2013) dan penelitian milik Sudibyakto, dkk. (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata Kotagede Yogyakarta, 2015). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wignyo Adiyoso dan Hidehiko Kanegae (*Tsunami Resilient Preparedness Indicators: The Effects of Integrating Religious Teaching and Roles of Religious Leaders*, 2017). Riset yang dilakukan oleh Adiyoso dan Kanegae berangkat dari penelitian sebelumnya dan asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa bencana merupakan cobaan atau murka dari Tuhan karena perbuatan manusia. Oleh karena itu riset ini bertujuan untuk menguji efektivitas dari indikator *Tsunami Resilient Preparedness* (TRP) yang disampaikan melalui sebuah pesan-pesan agama yang tertuang dalam selebaran, untuk mengajak 173 masyarakat di wilayah Yogyakarta yang rawan bencana tsunami. Selain itu peneliti merumuskan bagaimana peran pemimpin agama dalam mendorong dan mempengaruhi masyarakatnya untuk mengambil tindakan TRP ketika terjadi bencana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah informasi yang berbaur islami tentang kebencanaan terbukti efektif dalam mempengaruhi masyarakat. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa tokoh agama dalam sebuah tempat juga bisa mengintervensi masyarakat dalam mengambil tindakan kesiapsiagaan bencana.

Topik riset keempat adalah modal sosial dalam bencana dilakukan oleh Syamsul Maarif, dkk. (Kapital Sosial Dalam Relokasi Permukiman Pasca Erupsi Merapi Pembelajaran Dari Studi Kasus Cangkringan Sleman Yogyakarta, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberagaman

tanggapan komunitas terhadap rencana relokasi pemukiman pasca erupsi Merapi 2010. Penelitian ini dilakukan di tiga desa di Kecamatan Cangkringan dan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami bagaimana masyarakat di tiga desa tersebut merespon terhadap relokasi sebagai upaya mitigasi bencana. Hasilnya adalah respon masyarakat dalam menanggapi relokasi bisa dibagi menjadi empat kategori: 1) masyarakat yang menerima relokasi secara mandiri, masyarakat yang menanggapi positif kebijakan ini alasannya karena mereka mempunyai sumberdaya ekonomi sendiri untuk kembali ke kehidupan normal, keputusan ini dibuat oleh untuk keluarga mereka masing-masing; 2) Masyarakat yang menerima relokasi secara kolektif, biasanya warga akan bermusyawarah terlebih untuk memutuskan apakah mereka ingin di relokasi atau tidak; 3) yaitu masyarakat yang menerima kebijakan relokasi dengan syarat, biasanya masyarakat ini menetapkan berbagai syarat yang diajukan kepada pemerintah dalam bentuk negosiasi; dan 4) masyarakat yang menolak untuk direlokasi, masyarakat yang menolak untuk direlokasi biasanya karena alasan ekonomi, sosial dan kultural. Keempat pengelompokan diatas tentunya dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing tempat mereka tinggal.

Lany Verayanti (Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Strategi Masyarakat dalam Mengatasi Dampak dan Upaya Menurunkan Tingkat Risiko Bencana: Studi Kasus: Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperti apa bentuk dan cara modal sosial yang digunakan oleh warga masyarakat Nagari Batu Kalang, kedua mencari tahu peran pihak eksternal terkait dengan modal sosial, dan ketiga mendeskripsikan hubungan tindak kesiapsiagaan masyarakat dengan struktur sosial masyarakat Nagari Batu Kalang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, modal sosial ternyata bukan hanya berdampak positif bagi individu saja, apabila modal sosial tidak terpenuhi dengan baik maka aksi kolektif juga tidak bisa terlaksana juga ketika modal sosial bersinggungan dengan pihak eksternal ternyata kondisi tersebut bisa membuat lemahnya modal sosial yang ada di masyarakat tersebut.

Modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan bukan hanya berfungsi sebagai pemersatu dan penguat suatu komunitas, namun juga bisa menjadi alat untuk mengurangi risiko bencana. Ketika seseorang atau bahkan komunitas memiliki modal sosial yang tinggi maka hal tersebut akan

mempengaruhi pengetahuan individu atau masyarakat tentang bencana. Hal ini ditunjukkan dari riset yang dilakukan oleh Mohammad Dokhi, dkk (*Social Capital and Disaster Preparedness in Indonesia: A Quntitative Assesment Through Binary Logistic Regression*, 2017).

Penelitian berikutnya adalah Peran Modal Sosial dalam Resiliensi Komunitas Menghadapi Erupsi Gunung Merapi oleh Aisyah Karimatunnisa (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan di Komunitas Kalitengah Lor ketika menghadapi erupsi Gunung Merapi. Selanjutnya peneliti juga menganalisa bagaimana modal sosial dan bentuk modal sosial di Komunitas Kalitengah Lor, lalu dari modal sosial yang dimiliki tersebut bagaimanakah peranannya dalam resiliensi komunitas Kalitengah Lor menghadapi erupsi Gunung Merapi. Hasil yang didapatkan dari analisis adalah Kalitengah Lor memiliki modal sosial yang kuat karena beberapa hal yaitu jaringan komunitas yang kuat baik jaringan antar anggota komunitas maupun jaringan antar komunitas. Komunitas juga memiliki komitmen yang kuat yang membuat mereka tidak mau untuk direlokasi. Komunitas mengenal identitas komunitasnya, mereka bangga dan mencintai komunitas Kalitengah Lor. Timbal balik, norma kerjasama, dan saling percaya dalam komunitas Kalitengah Lor juga kuat, seperti memiliki tanggungjawab untuk membantu sesama tanpa ada rasa curiga.

Keempat topik yang telah disebutkan, penelitian ini termasuk ke dalam topik riset ketiga dan keempat yaitu tentang resiliensi dan modal sosial. Jadi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama penelitian tentang modal sosial masih jarang sekali di Indonesia, sekali pun ada yang membahas tentang modal sosial pembahasannya lebih di fokuskan kepada sisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini membahas modal sosial dengan fokusnya adalah mitigasi bencana dan ketahanan suatu masyarakat. Penelitian lain yang membahas modal sosial dan resiliensi milik Aisyah Karimatunnisa (2017) dengan judul Peran Modal Sosial dalam Resiliensi Komunitas Menghadapi Erupsi Gunung Merapi. Aisyah (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan modal sebagai dampak yang positif dalam membangun kembali sebuah masyarakat. Penelitian ini justru ingin mengungkapkan bagaimana modal sosial dalam meningkatkan atau justru sebaliknya menurunkan upaya pengurangan risiko bencana dan resiliensi komunitas.

E. Kerangka Teori

1. Modal Sosial

Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Bencana yang menimpa suatu tempat sudah pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang berada disana. Seburuk apapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat tertentu masih bisa diatasi dengan membangun kembali lingkungan yang mereka tempati. Ketika sebuah desa yang rentan terkena risiko bencana, namun mampu menghadapi bencana tersebut dengan baik desa tersebut dinamakan desa tangguh bencana. Untuk menjadi desa yang tangguh bencana diperlukan modal sosial yang baik. Pemahaman tentang konsep modal sosial berbeda-beda di kalangan praktisi Ilmu Ekonomi dan Sosial. Kapital sosial yang dalam segi ekonomi harus membawa ke arah yang lebih positif serta harus mampu membuat peningkatan kesejahteraan sosial yang meluas, (Lawang, 2004, hal. 30).

Bourdieu (1973) dalam Field (2004, hal. 15) seorang sosiolog dari Eropa dalam diskusinya mendefinisikan modal sosial sebagai modal hubungan sosial yang menyediakan dukungan yang berguna (jika diperlukan) seperti: modal dan kehormatan. Kehormatan sangat sering diperlukan jika memiliki satu keinginan untuk menarik klien dalam posisi yang sangat penting, dan dapat berfungsi sebagai mata uang seperti dalam politik karir. Pengertian konsep ini kemudian disempurnakan kembali oleh Bourdieu (1973) dalam Field (2004, hal. 15) menjadi:

Sebagai jumlah sumber daya aktual atau virtual yang diperoleh dari individu ataupun kelompok berdasarkan jaringan yang dimiliki dengan hubungan saling mengenal dan pengakuan yang kurang lebih dilembagakan.

Bourdieu memandang modal sosial lebih kepada hubungan dominasi dengan hak istimewa. Bourdieu mengusulkan bagi para kelompok elit untuk menggunakan simbol-simbol budaya sebagai penanda perbedaan, keduanya memberikan sinyal untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial.

Berbeda halnya dengan Bourdieu, Coleman memandang konsep modal sosial tidak tertabas, namun juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Konsep modal sosial menurut Coleman dalam Field

(2004, hal. 24) sebagai kumpulan sumber daya yang ada di dalam hubungan keluarga atau organisasi sosial masyarakat dan berguna untuk perkembangan kognitif atau sosial anak.

Paldam dalam Laba (2006, hal. 6) menggambarkan modal sosial sebagai pengikat bagi hubungan sosial masyarakat. Ia membagi modal sosial menjadi tiga pendekatan yaitu kerjasama, kepercayaan, dan jaringan. Sedangkan menurut Narayan (1999) dalam Laba (2006, hal. 6) mengartikan modal sosial sebagai norma dan hubungan sosial yang tertambat di dalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan orang-orang mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan bersama.

Modal sosial dibedakan menjadi tiga menurut Woolcock (2001, hal. 13-14) yaitu pertama adalah *bonding social capital* (mengikat) yaitu ikatan yang terjalin erat antar individu seperti keluarga, kerabat dekat, atau tetangga. Kedua adalah *bridging social capital* (menjembatani) yaitu modal sosial yang ikatannya tidak terlalu erat antara individu satu dengan yang lainnya, dalam kondisi seperti ini bisa diibaratkan seperti hubungan dengan teman kantor. Terakhir adalah *Lingking social capital* (menghubungkan) yaitu modal sosial yang bertugas untuk menghubungkan atau menjangkau individu-individu yang berada diluar komunitas (pihak eksternal) sehingga mendorong anggotanya untuk bisa memanfaatkan sumberdaya eksternal dibandingkan sumberdaya internal. Hampir serupa dengan Woolcock, Putnam (1996) dalam Field (2004, hal. 32) membagi modal sosial menjadi dua yaitu modal sosial inklusif dan eksklusif.

Ledogar dan Fleming (2008, hal. 2) membagi modal sosial menjadi dua yaitu Modal sosial ekologi dan komunitas, yaitu modal sosial yang secara umum terjelaskan dalam lima komponen sebagai berikut: jaringan komunitas (keikutsertaan masyarakat dan jaringan pribadi), komitmen masyarakat (partisipasi aktif dari masyarakat), identitas masyarakat lokal (adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi), dan kepercayaan (rasa saling percaya sebagai poin utama modal sosial). Modal sosial ekologi dan komunitas ini dipopulerkan oleh Putnam (1993;1995) dalam Ledogar dan Fleming (2008, hal. 2) yang biasa disebut juga sebagai "*ecological social capital*". Modal sosial yang kedua adalah Modal sosial

individual, yaitu modal sosial yang lebih menekankan pada aktor individu dan tindakan mereka.

Sayang modal sosial tidak selamanya berdampak positif bagi sebuah masyarakat. Portes (1998) dalam Ledogar dan Fleming (2008, hal. 7) menjelaskan bila mekanisme yang sama menghasilkan modal sosial yang positif bagi individu dan kelompok dapat memiliki konsekuensi lain yang tidak diinginkan, diantaranya adalah: mengesampingkan orang luar, klaim berlebihan pada anggota kelompok, pembatasan kebebasan individu, dan norma-norma yang mengarah ke bawah. Norma-norma yang dipaksakan pada hubungan suatu kelompok akan memungkinkan timbulnya kekerasan. Misalnya seperti kelompok Mafia, ISIS dan pemuda jalanan.

Dampak negatif dari modal sosial juga dibahas oleh Fukuyama (2001, hal. 8). Menurut *cohesiveness* yang berbeda antara satu kelompok dengan lainnya bisa menunjukkan ukuran kualitatif yang sangat penting untuk modal sosial. Bila kelompok yang memiliki ikatan sosial yang tinggi dapat memunculkan tindakan kolektif yang terkoordinasi, namun juga bisa menciptakan sifat eksklusif yang menimbulkan kerugian bagi anggota di luar kelompok tersebut. Ia juga menambahkan semakin besar *radius of trust* maka semakin besar ancaman kerugian bagi masyarakat sekitar, begitu juga sebaliknya. Antara *cohesiveness* dan *radius of trust* sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain, oleh sebab itu untuk menghasilkan eksternalisasi yang positif bagi masyarakat maka yang perlu dilakukan adalah memperluas *radius of trust* dan memperbesar *cohesiveness* (Fukuyama, 2001, hal. 8-10).

Hal ini akan menjadi bahaya apabila terjadi persatuan dan rasa kepercayaan yang tinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki kerentanan bencana, seperti misalnya masyarakat di Desa Kepuharjo. Tingginya kepercayaan mereka terhadap satu sama lain, dan perasaan satu akan pemikiran dan sebagainya membuat mereka secara bersama memilih untuk tetap menempati rumahnya masing-masing. Tindakan kolektif yang terkoordinasi ini didasarkan terhadap ikatan sosial yang tinggi dalam kelompok tersebut. Mungkin hal tersebut sekilas terlihat baik karena memperlihatkan solidaritas antara masyarakat, namun disatu sisi dapat merugikan bagi anggota luar di kelompok tersebut. Modal sosial yang tinggi

juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan seperti mengabaikan kehadiran orang luar (*exclusion of outsiders*). Masyarakat mungkin akan mengabaikan kehadiran orang-orang luar dari kelompoknya seperti pemerintah, LSM, atau lembaga swasta lainnya yang hendak memberikan perlindungan kepada mereka dengan cara mengevakuasi masyarakat Desa Kepuharjo.

2. Mitigasi dan Resiliensi Bencana

Umumnya suatu wilayah atau desa terkena bencana apabila tempat tersebut memiliki kerentanan yang tinggi. Kerentanan menurut Coburn, dkk. (1994, hal.16) ialah tingkat dari suatu kerusakan yang diperkirakan dari satu bahaya khusus. Setiap masing-masing daerah memiliki kerentanannya masing-masing. Misalnya untuk daerah yang sering terjadi gempa, bangunan yang menggunakan batu bata tentunya akan mudah runtuh dibandingkan dengan bangunan yang memiliki fondasi yang kuat. Oleh sebab itu pengenalan atau pemahaman penuh tentang sifat bencana adalah hal kritis dalam mitigasi bencana.

Pengurangan Risiko bencana atau bisa juga disebut sebagai mitigasi bencana sudah tertera dalam Kerangka Aksi Hyogo tahun 2005-2015. Mengingat bahaya bencana bisa datang kapan saja dan menimbulkan bahaya yang cukup parah apabila tidak diantisipasi oleh karena itu masyarakat perlu memahami mitigasi bencana. Bencana sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 Nomor 1 adalah:

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengurangan risiko bencana menurut Astuti dan Sudaryono (2010, hal. 33) adalah penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketangguhan disemua aspek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 nomor 9 lebih jelas mendefinisikan mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat.

Harapan dari tindakan pengurangan risiko bencana adalah untuk menciptakan *zero victim* di tempat terjadinya bencana. Meskipun untuk

sekarang rasanya agak sulit untuk menciptakan hal tersebut, paling tidak masyarakat beserta lembaga/institusi terkait mampu mengurangi dampak kerusakan maupun korban jiwa. Pengurangan risiko bencana tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Coburn, dkk. (1994, hal.34) bahwa melawan bencana sama halnya seperti memerangi penyakit, harus dilawan oleh setiap orang secara bersama-sama dan melibatkan masyarakat dan investasi sektor swasta. Namun sayangnya seringkali tindakan mitigasi bencana ini berjalan dengan pendekatan “*top down*”. Masyarakat diberikan instruksi-intruksi dari atas untuk menjalankan tindakan pengurangan risiko bencana berdasarkan gejala-gejala bencana, bukan berdasarkan penyebabnya. Penggunaan pendekatan seperti itu menurut Coburn, dkk (1994, hal. 34) hanya cenderung menekankan tindakan mitigasi fisik dibandingkan dengan perubahan sosial untuk membangun sumberdaya dari kelompok yang rentan, masyarakat tidak ikut berperan aktif dalam penyusunan strategi mitigasi bencana, sehingga pemerintah gagal dalam merespon kebutuhan riil masyarakat.

Langkah alternatif yang dapat diambil adalah dengan mengupayakan mitigasi berbasis masyarakat, yaitu mengikutsertakan masyarakat kedalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam tindakan pengurangan risiko bencana. Tindakan ini diharapkan bisa membuat masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang ada di dalam komunitasnya. Ketika masyarakat mampu bertahan dengan kondisi lingkungan disekitarnya serta kemungkinan risiko yang akan didapatkan apabila tinggal menetap di daerah rawan bencana adalah masyarakat yang tangguh akan bencana. Ketahanan dalam menghadapi bencana biasa disebut sebagai resiliensi.

Menurut Jordan dan Will (2017, hal. 2192), resiliensi adalah kemampuan untuk menahan dampak dari bencana serta mengantisipasi dampak-dampak tersebut dan segera pulih. Resiliensi komunitas menurut VanBreda (2001, hal. 1) adalah kemampuan masyarakat untuk membangun, mempertahankan, dan mendapatkan kembali tingkat kapasitas komunitas yang diharapkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan positif. Colburn (2011, hal. 6) mendefinisikan resiliensi menjadi beberapa karakteristik,

yaitu paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Resiliensi pada umumnya digunakan untuk mengkaji kapasitas bahan untuk kembali pada titik keseimbangan dalam ilmu matematika dan fisika, namun Longstaff, dkk.(2010) telah memberikan pendekatan baru terhadap resiliensi dari penilaian sosial yang dinilai berdasarkan struktur komunitas internal, sejarah komunitas, dan kerentanan komunitas.

Menurut Kaplan, dkk. (1996) dalam VanBreda (2001, hal. 5), ketahanan ditentukan pada kehadiran faktor protektif seperti jaringan pengaman pribadi, sosial, keluarga, dan kelembagaan yang memungkinkan seorang individu menolak untuk stress dengan kehidupan. Polk (1997) dalam VanBreda (2001, hal. 5) merangkum empat pola resiliensi dari *literature resiliensi individual*, yaitu diantaranya:

1. Pola disposisional, pola yang berhubungan dengan atribut psikososial yang berhubungan dengan fisik dan ego untuk mempromosikan ketahanan. Misalnya seperti kesehatan fisik individu, rasa harga diri, dan penampilan fisik yang baik.
2. Pola relasional, pola yang menyangkut peran individu dalam masyarakat dan hubungannya dengan orang lain.
3. Pola situasional, pola yang membahas aspek-aspek yang melibatkan hubungan antara individu dan situasi yang menegangkan. Misalnya, kapasitas individu dalam memecahkan masalah, mengambil suatu tindakan, dan menanggapi situasi.
4. Pola filosofis, pola yang mengacu pada pandangan dunia individu atau paradigma kehidupan. Keyakinan akan makna yang terjadi dalam setiap pengalaman individu.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma ini menurut Kriyantono (2006, hal. 53) menganggap sebuah realitas sebagai konstruksi sosial serta dipengaruhi oleh konteks, waktu, dan pengalaman dimana kebenaran suatu realitas tersebut bersifat relatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini biasanya seperti observasi non-partisipan,

observasi partisipan, studi kasus, analisis isi kualitatif, ataupun *focus group discussion* (Kriyantono, 2006, hal. 52)

2. Pendekatan

Sevilla, dkk (1993, hal. 40) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan dalam penelitian, yaitu pertama adalah *historis*, deskriptif, kausal komparatif, dan partisipatoris. Penelitian ini sendiri termasuk ke dalam penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus menurut Sevilla, dkk (1993, hal. 73) adalah penelitian yang terinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun waktu tertentu. Kita akan mengamati perilaku tiap individu dalam berinteraksi dan merespon setiap hal yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut memungkinkan kita untuk melakukan pengumpulan informasi berdasarkan pengalaman-pengalaman individu yang telah berlalu.

3. Lokasi dan Waktu Riset

Penelitian ini memilih Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sebagai lokasi penelitian sekaligus menjadi objek penelitian. Desa Kepuharjo memiliki delapan dusun diantaranya adalah Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, Dusun Petung, Dusun Kopeng, Dusun Batur, Dusun Pagerjurang, Dusun Kepuh, dan Dusun Manggong. (<https://kepuharjodes.slemankab.go.id>, akses 27 April 2018). Sebagai wilayah yang termasuk KRB III, penelitian ini memilih dua dusun dari Desa Kepuharjo yaitu Dusun Jambu dan Dusun Petung. Alasan lain mengapa dua dusun tersebut yang akan dijadikan objek lokasi riset karena tiga dusun tersebut hingga saat ini masih ditempati oleh warga dan terjadi aktivitas baik sosial maupun ekonomi. Waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu selama satu tahun lebih lima bulan (Januari 2018 – Mei 2019). Bulan Januari 2018 hingga Juli 2018 adalah masa pengerjaan proposal dalam mata kuliah Seminar Proposal. Bulan September 2018 mulai membuat daftar pertanyaan dan narasumber potensial yang akan diwawancarai, dilanjutkan observasi sebanyak 5 kali. Wawancara narasumber dimulai sejak awal Oktober 2018 sampai dengan akhir November 2018. Data yang telah diterima kemudian ditranskrip, reduksi dan kategorisasi di bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Bulan Januari - Februari 2019 sudah mulai mendeskripsikan data secara lengkap. Bulan Maret – Mei 2019 adalah masa

penulisan bab pembahasan, termasuk wawancara tambahan untuk melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pemilihan Narasumber

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive representative*, maksudnya adalah pemilihan narasumber yang memiliki karakteristik dan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan ditentukan berdasarkan lama tinggal dan pernah mengalami erupsi 2010. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu Heri Suprpto (Kepala Desa Kepuharjo), Irin (Kepala Dusun Petung), Ngatinem (Warga Ds.Jambu), Isdi (Warga Ds.Jambu), Jumiran (Ketua RT 01 Ds.Petung), Marjo Suyatno (Warga Ds. Jambu), Kuat (Kepala Dusun Jambu) dan Suprpti (Ds. Tegalpanggung).

5. Teknik Pengumpulan Data

Prastowo (2010, hal. 22) dalam bukunya membagi tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Creswell (2009, hal. 267) dalam bukunya juga membagi tiga teknik pengambilan data yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan dua teknik yaitu observasi dan wawancara.

Observasi adalah menurut Creswell (2009, hal. 267) kegiatan dimana peneliti terjun ke lapangan langsung untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Observasi dilakukan sebanyak 5 kali pada 06 September s.d 07 Oktober 2018. Observasi pertama yaitu pada tanggal 06 September mengunjungi lokasi penelitian secara umum dari mulai Ds. Kepuh (sebelah selatan desa) sampai Ds. Kopeng (sebelah utara desa) dan dilanjutkan pada tanggal 07 September 2018 ke Ds. Petung dan Ds. Jambu. Observasi dilakukan untuk mengetahui letak strategis lokasi penelitian, sebaran penduduk, dan kondisi lingkungan saat ini dengan menggunakan penginderaan sekaligus mendokumentasikan dengan menggunakan kamera. Observasi kedua 13 September 2018 melakukan observasi ke Kantor Desa Kepuharjo untuk menanyakan syarat izin melakukan penelitian dan mengatur waktu wawancara dengan kepala Desa, baru dihari berikutnya yaitu 17 September membawa persyaratan untuk

diserahkan kepada kantor Desa Kepuharjo. Hari terakhir yaitu tanggal 07 Oktober peneliti melakukan observasi ke Huntap Pagerjurang dan Huntap Batur untuk mengetahui kepadatan penduduk, kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Huntap.

Sedangkan wawancara menurut Prastowo (2010, hal. 146) adalah suatu metode pengumpulan data berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dari 11 Oktober – 22 November 2018. Topik yang dibahas dalam sesi wawancara yaitu seputar data kependudukan, cerita pengalaman saat erupsi Merapi 2010 dan pasca erupsi, hubungan sosial yang terjalin di masyarakat, pengadaan bantuan, partisipasi yang mereka lakukan untuk Desa, kondisi lingkungan tempat tinggal mereka saat ini, permasalahan yang mereka hadapi setelah erupsi 2010, dan bagaimana mereka bertahan serta bangkit kembali dari ancaman bencana Erupsi Merapi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian, Creswell (2009, hal. 274). Analisis data kualitatif-verifikatif terdiri dari tiga tahap, yaitu: pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian langkah berikutnya adalah reduksi data, dengan memilah data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian, mengubah format rekaman wawancara menjadi data tulisan yang selanjutnya bisa diolah. Terakhir adalah mengkategorisasikan data tersebut ke dalam sub-sub tema yang telah ditentukan dengan melihat hasil reduksi data. Baru kemudian terakhir adalah tahap penyimpulan data, hasil akhir dari analisis data ini akan di uji dengan teori yang sudah ada untuk kemudian menarik kesimpulan